

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bandar Seri Bentan,

2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BINTAN,

TTD

dr. H. GAMA AF ISNAENI, Sp.A, M.Sc
Pembina Tk. I
NIP. 19671017 199703 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | dst |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | |
| 1.2. Dasar Hukum | |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | |
| BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN Kab. BINTAN | |
| 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bintan | |
| 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | |
| 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | |
| 2.4 Kebijakan Strategis | |
| 2.5 Penghargaan | |
| BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BINTAN ATAS LKPJ BUPATI KABUPATEN BINTAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 | |
| BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN | |
| 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya | |
| BAB V PENUTUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Kabupaten Bintan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Bintan. LKPJ Bupati Kabupaten Bintan ATA 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020.

LKPJ Bupati Kabupaten Bintan ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Bintan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Bintan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan yang melaksanakan urusan otonomi daerah bidang Kesehatan, Menyampaikan hasil dari capaian Kinerja pada Tahun anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan misi ke -4 Bupati Bintan.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan, diperlukan tolok ukur dan penilaian indikator kinerja sesuai dengan Renstra OPD Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 juga merupakan sinergisitas perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional serta berpedoman juga pada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 serta didasari RPJMD Kabupaten Bintan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2021.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan ialah dalam rangka melaporkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2021 yang didasari oleh Misi ke- 4 Bupati dan Wakil Bupati Bintan yaitu *“Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global”*.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKPJ ini ialah untuk melihat capaian dari kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 dalam mewujudkan misi ke -4 Bupati Bintan yang berfokus pada tujuan dalam urusan Kesehatan yaitu *“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas”*.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut ialah:

- Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menyelenggarakan urusan wajib yaitu Urusan Kesehatan, dimana Pencapaian Indikator kinerja pada Misi Ke-empat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Rumus Perhitungan | Satuan | Target | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU |
|-----------|---|---|----------------|---------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat | Jumlah total desa/kelurahan yang menyelenggarakan Kawasan tatanan sehat dalam 1 tahun | Desa/Kelurahan | 51 | 51 | Kawasan sehat merupakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|-------------|---|
| | | | | | | pemerintah daerah |
| 2. | Presentase balita gizi buruk | Jumlah kasus balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang dikali 100% (5/10320) x 100% | Persen | <0,5 | 0,18 | Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk provinsi dan nasional dimana angka gizi buruk provinsi Kepri 5,3% dan angka gizi buruk nasional 3,82%, sedangkan target nasional adalah <1% |
| 3. | Angka Kematian Bayi | jumlah kematian bayi dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1000 (14/2.859) x 1.000 = 4,9 | /1000 Kelahiran Hidup | 12 | 10,3 | Tahun 2021 untuk Target Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu < 12/1.000 KH. Sedangkan untuk Target Jumlah Kasus Kematian Bayi yaitu < 30 kasus. Hasil capaian Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2021 yaitu 10,3/1000 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|---------------------|--------------|---|
| | | | | | | KH dari 30 kasus kematian bayi |
| 4. | Angka Kematian Ibu | Jumlah kasus kematian ibu dibagi dengan angka kelahiran hidup dikali 100.000 (5/2.859) x 100.000 = 174 | /100.000 Kelahiran Hidup | <23 1 | 241,3 | Tahun 2021 untuk Target Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu < 231/100.000 KH, sedangkan untuk Target Jumlah Kasus Kematian Ibu yaitu < 7 kasus. Hasil capaian Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2021 yaitu 241,3/100.000 KH dari total 7 kasus kematian |
| 5. | Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk | Kecamatan yang memiliki angka API <1 per 1.000 penduduk | Kecamatan | 10 | 10 | Jika pada tahun 2020 terdapat 7 Kecamatan dengan angka API <1 per 1.000 penduduk maka pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka API <1 per 1.000 penduduk |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | | yaitu 10 kecamatan |
| 6. | Insiden Rate DBD per 100.000 Penduduk | Jumlah kasus baru dibagi jumlah penduduk dikali 100.000 | Persen | 33 | 33 | Angka insiden Rate DBD per 100.000 Penduduk untuk tahun 2021 adalah 33 |
| 7. | Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positif (sucess rate) | Jumlah pasien baru TB BTA positif (sembuh + pengobatan lengkap) dibagi jumlah pasien baru TB BTA positif yang di obati dikali 100% | Persen | 85 | 95,2 | Angka indicator sukses rate tahun 2021 adalah 95,2% |
| 8. | Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi | Jumlah seluruh puskesmas yang sudah di akreditasi | Puskesmas | 15 | 14 | Pada tahun 2021 tidak ada puskesmas yang di akreditasi karena pandemic covid 19 sehingga jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi masih sama seperti tahun lalu yaitu 14 puskesmas |
| 9. | Status Akreditasi Rumah Sakit oleh Komisi Akreditasi | | | Tk. Mad ya | Tk. Dasar | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---------------|------------|--------------|---|
| | Rumah Sakit (KARS) | | | | | |
| 10. | Persentase Penduduk yang menjadi peserta JKN | Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi jumlah penduduk dikali 100% | Persen | 100 | 91,69 | Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN pada tahun 2021 sebesar 91,69% (146.258 jiwa) |

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2018-2023;**
- 3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;**
- 5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;**
- 6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan**
- 7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.**

10.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kesehatan | Dinas Kesehatan | | Program Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Skrining Kesehatan 2. Persentase Cakupan Pelayanan Usia Lanjut 3. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 4. BOR (Bed Occupancy Ratio) 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6. Persentase bayi usia | Persen Persen Persen Persen Persen | 100 80 80 60 80 | 87 81,7 83,9 37,76 80,88 | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif | Persen | 33 | 65,06 | | | | | |
| | | | | | 7. Persentase Anemia Ibu Hamil | Persen | <5 | 9,24 | | | | | |
| | | | | | 8. Persentase balita gizi kurang | Persen | <5 | 5,41 | | | | | |
| | | | | | 9. . Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10 T | Persen | 100 | 97,9 | | | | | |
| | | | | | 10. . Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) | Persen | 100 | 96,4 | | | | | |
| | | | | | 11. Persentase kunjungan | Persen | 100 | 99,1 | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|---|----------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintan | Penduduk | 22.000 | 19.865 | | | | | |
| | | | | | 17. Persentase Desa Siaga Aktif | Persen | 100 | 100 | | | | | |
| 1 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | 46.165.164 | 36.582.000 | Sebagian besar SDM (terutama Bidan yang berada diujung tombak) adalah bidan baru dan masih sangat membutuhkan peningkatan skill dan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, orientasi, magang dan lain-lain | Melaksanakan kegiatan orientasi/pertemuan (Refreshing Program, Evaluasi Program, AMP, Orientasi Tatalaksana Asfiksia, dll) terkait peningkatan skill dan kompetensi bidan. Menginformasikan Bidan koordinator agar melakukan | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | (hasil Penyeliaan Fasilitatif tahun 2021 mayoritas bidan di desa belum pernah mengikuti pelatihan APN, Asfiksia, BBLR, PONED, CTU, dll yang merupakan standar bidan dalam melakukan asuhan kebidanan) | pembinaan dan pendampingan bides di wilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan kesehatan | |
| 2 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | 709.703.000 | 248.273.000 | Masih adanya Polindes yang belum memenuhi kualitas Fasilitas Kesehatan sesuai standar, sehingga menjadi hambatan masyarakat | Kordinasi ke bidang Sumber Daya Kesehatan (alkes) terkait sarana dan prasarana di polindes, sehingga bisa memenuhi kualitas | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | untuk mendapatkan kepuasan pelayanan ke fasilitas kesehatan terdekat yang ada diwilayahnya (data sesuai hasil daftar tilik Penyeliaan Fasilitas Polindes tahun 2021) | Fasilitas Kesehatan sesuai standar | |
| 3 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | 8.095.750 | 8.090.000 | Kondisi Pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, terutama kegiatan yang tatap muka di luar gedung seperti posyandu, kelas ibu hamil, kelas | Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan mengikuti aturan juknis pemberian layanan kesehatan di era pandemi COVID-19. Sedangkan kegiatan diluar gedung | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | ibu balita, SDIDTK, dll | ditunda pelaksanaannya, tetapi dilakukan secara daring melalui WA Group dan sweeping untuk kasus-kasus Kelompok RESTI | |
| 4 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | 20.626.600 | 10.100.000 | Masih adanya alat pengukuran dan penimbangan (antropometri kit) di posyandu yang belum lengkap dan tidak layak pakai | Menganggarkan belanja antropometri kit untuk Posyandu melalui kegiatan (antropometri kit) di posyandu yang belum lengkap dan tidak layak pakai | Mengadakan pertemuan bagi kader posyandu dalam rangka |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | pengukuran dan penimbangan sesuai pedoman nya, dan belum paham pengisian KMS | refresing tata laksana terkait proses kegiatan diposyandu | |
| 5 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | 52.252.850 | 17.954.000 | Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih belum mencapai target karena dampak pandemi covid-19 | meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan pelayanan penjangkaran kesehatan melalui program UKS untuk mencapai pembangunan kesehatan yang lebih baik | |
| 6 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | 21.524.800 | 19.817.936 | Tidak adanya generasi tenaga Konselor Sebaya bagi remaja di | Mengusulkan anggaran untuk pelatihan konselor sebaya bagi remaja agar | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <p>sekolah, sehingga kurangnya wadah penjangkaran masalah remaja</p> <p>Masih adanya puskesmas yang belum membentuk dan membina Posyandu Remaja, dimana masih adanya kasus Covid-19 dan pembatasan Perkumpulan Masyarakat, sehingga belum bisa melaksanakan SMD dan MMD di</p> | <p>mendekatkan pelajar dan menjangkarkan masalah remaja melalui pendekatan remaja itu sendiri</p> <p>Tahun 2022 diharapkan menurunnya kasus Covid-19 sehingga desa/kelurahan bisa melaksanakan SMD dan MMD. Semua puskesmas di Kabupaten Bintan dapat membentuk dan membina Posyandu Remaja di wilayah kerja</p> | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Desa/Kelurahan dalam rangka membahas pentingnya Posyandu Remaja. Masih minimnya alat pemeriksaan HB khusus remaja untuk pemeriksaan HB di sekolah yang dilakukan oleh pengelola remaja di Puskesmas | Puskesmas masing-masing Tahun 2022 mengganggu belanja alat pemeriksaan HB khusus remaja untuk 15 Puskesmas di Kabupaten Bintan | |
| 7 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | 19.569.400 | 15.267.000 | Kurangnya tenaga medis (dokter) dalam memberikan pelayanan kesehatan di luar gedung | Mengusulkan tambahan tenaga medis (dokter) di puskesmas, sehingga adanya pelayanan konsultasi/ | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <p>(Posyandu Lansia), sehingga Pelayanan Posyandu Lansia kurang optimal</p> <p>Adanya masa era pandemi Covid-19 mengakibatkan ruang gerak kegiatan terbatas, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan yang berlangsung di masyarakat di tunda sebagai upaya pemutus rantai</p> | <p>pengobatan oleh dokter di posyandu lansia (agar lansia lebih semangat mengikuti kegiatan di posyandu setiap bulannya)</p> <p>Dilakukan Sweeping bagi lansia resiko tinggi, pemantauan dan menerima konsultasi melalui via telp</p> | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | penularan Covid-19 | | |
| 8 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | 168.090.600 | 153.135.911 | Masih kurangnya SDM untuk melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM terutama Penyakit Hipertensi dan mengentri ke Aplikasi pencatatan dan pelaporan PTM dan Keswa di Puskesmas | Meningkatkan kuantitas tenaga kesehatan di puskesmas untuk Pelayanan Terpadu PTM di Puskesmas dan tenaga pencatatan pelaporan SI-PTM dan SIM KESWA | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | 28.816.700 | 25.148.258 | Pengelola Program PTM sebagian besar melaksanakan tugas rangkap untuk beberapa kegiatan baik di dalam gedung | Meningkatkan kerjasama antar pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk Pelayanan terpadu Penyakit Tidak | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | maupun di luar gedung | Menular serta pembinaan Posbindu PTM | |
| 9 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | 22.490.000 | 21.789.430 | <ul style="list-style-type: none"> •Penemuan kasus TB secara internal dan eksternal sudah dilakukan dengan optimal namun hasilnya belum optimal. •Di beberapa puskesmas tidak terdapat tenaga mikroskopis sehingga banyak terduga TB yang tidak bisa di periksa secara mikroskopis . | <ul style="list-style-type: none"> •Dibutuhkan inovasi-inovasi dalam upaya penemuan kasus TB misalnya meningkatkan koordinasi melalui integrasi kegiatan program dengan kegiatan PIS-PK. •Mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bintan untuk melakukan rekrutmen tenaga mikroskopi guna menunjang | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> •Sulitnya untuk mendapatkan akses tentang terduga TB yang terjaring di DPM. •Masih terdapat pasien yang hasil akhir pengobatan TBnya GAGAL | <ul style="list-style-type: none"> kegiatan penemuan kasus TB di FKTP. •Membuat nota kesepakatan dengan DPM tentang mekanisme pelaporan terduga TB yang terjaring di DPM. •Memberikan kesempatan kepada pasien TB untuk memilih sendiri anggota keluarga yang akan menjadi PMO nya sehingga proses pengobatan bisa terpantau dengan baik | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | dan pasien merasa nyaman sehingga mau menjalankan proses pengobatan sampai tuntas | |
| 10 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | | | | | 24.350.000 | 15.829.781 | <ul style="list-style-type: none"> •Masih kurangnya kesadaran kelompok populasi kunci untuk memeriksakan kesehatannya di klinik IMS •Letak klinik di daerah lokalisasi membuat kelompok resiko tinggi maupun kelompok resiko rendah menjadi enggan | <ul style="list-style-type: none"> •Petugas telah melakukan komunikasi motivasi kepada kelompok populasi kunci tentang pentingnya melakukan pemeriksaan IMS secara berkala. •Membuka layanan untuk pemeriksaan HIV dan IMS pada FKTP maupun FKTRL. | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <p>untuk memeriksakan kesehatannya di klinik IMS</p> <p>•Kurangnya dukungan anggaran sehingga petugas sulit untuk melakukan penjangkauan di luar gedung</p> <p>•Belum adanya layanan pemberian ARV sehingga masih banyak orang yang hasil test HIV reaktif loss to follow up.</p> <p>•Masih tingginya stigma di masyarakat</p> | <p>•Koordinasi dengan LSM dan Komosi Penanggulangan HIV dalam hal penjangkauan di luar gedung.</p> <p>•Membuat usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal pembentukan layanan ARV di Puskesmas Toapaya.</p> <p>•Melakukan penyuluhan tentang HIV AIDS dan IMS di masyarakat</p> | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|--------|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | terhadap ODHA | | |
| 1 1 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa(KLB) | | | | | 1.043.153.620 | 655.122.600 | | | |
| 1 2 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | 6.368.731.982 | 5.765.579.862 | | | |
| 1 3 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi | | | | | 37.316.750 | 29.599.600 | Masih belum optimalnya pencatatan dan pelaporan | Mengadakan pertemuan bagi tenaga pelayanan gizi | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | Masyarakat | | | | | | | online surveilans gizi di aplikasi eppgbm | puskesmas se-Kabupaten Bintan dalam rangka pencatatan dan pelaporan data terintegrasi surveilans gizi berbasis eppgbm, dan Menghimbau untuk melaksanakan pelaporan melalui eppgbm setiap bulannya | |
| 14 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | 55.278.600 | 7.449.936 | pandemi Covid-19, PPKM level 4, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan langsung kelapangan / Masyarakat, | memotivasi pemegang program Kesehatan kerja dan olah raga puskesmas agar lebih meningkatkan lagi kegiatan | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | dan anggaran yang beberapa kali mengalami Refocussing | Kesjaor dan membina POS UKK yang ada serta membentuk Pos UKK yang belum ada | |
| 15 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | 177.202.900 | 91.186.550 | sulitnya untuk melakukan pemicuan dan merubah prilaku masyarakat yang tidak BABS terutama yang rumahnya di daerah pesisir, serta masih adanya jamban yang belum di lengkapi dengan Septik Tank, dimana pembuangannya langsung ke | melakukan pemicuan di masyarakat bersama Puskesmas setempat, dan pendekatan dengan kepala desa serta bekerja sama dengan lintas sektor terkait | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | laut atau ke sungai | | |
| 16 | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | 146.878.500 | 87.816.000 | <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Program Promkes sebagian besar melaksanakan tugas rangkap untuk beberapa kegiatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. - Masih kurangnya tenaga ahli promosi kesehatan baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> - Melatih tenaga puskesmas tentang promosi kesehatan di Puskesmas - Meningkatkan kerjasama antar pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam pembinaan Promosi Kesehatan. | |
| 17 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradision | | | | | 42.926.000 | 41.019.500 | 1. Masih banyak Puskesmas yang belum melaksanakan | Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke Puskesmas | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | al, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | <p>1. pelayanan kesehatan tradisional, baik itu dalam bentuk pelayanan akupresur, konseling Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional maupun pelayanan Jamu</p> <p>2. Belum semua Puskesmas mempunyai Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p> | yang belum melakukan pelayanan kesehatan tradisional baik pelayanan akupresur, konseling Asman maupun pelayanan jamu | |
| 18 | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | 50.557.100 | 32.450.000 | 1. Kondisi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan kinerja program surveilans dan | 1. Perlunya penambahan SDM Surveilans dan Imunisasi di masa pandemic Covid-19 sehingga | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <p>imunisasi karena sebagian besar SDM terkonsentrasi pada penanganan Covid-19</p> <p>2.Masih rendahnya kesadaran petugas surveilans Puskesmas untuk mengirimkan laporan SKDR tepat waktu</p> | <p>kegiatan-kegiatan program dapat dilaksanakan dengan baik dengan SDM yang cukup</p> <p>2.Perlunya memberikan penyegaran bagi petugas surveilans puskesmas untuk meningkatkan kinerja dalam mengirimkan laporan SKDR</p> | |
| 19 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | 43.524.000 | 24.324.085 | | | |
| 20 | | | | Pengelolaan Upaya | | | | | 300.000.000 | 300.000.000 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | Kesehatan Khusus | | | | | | | | | |
| 21 | | | | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | 26.999.635 | 21.719.280 | | | |
| | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | 448.120.000 | 429.061.965 | 1.Masih kurangnya SDM untuk melakukan pemeriksaan faktor risiko PTM dan mengentri ke Aplikasi pencatatan dan pelaporan PTM dan Keswa di Puskesmas. 2.Pengelola Program PTM sebagian besar | 1.Meningkatkan kuantitas tenaga kesehatan di puskesmas untuk Pelayanan Terpadu PTM di Puskesmas dan tenaga pencatatan pelaporan SI-PTM dan SIM KESWA 2.Meningkatkan kerjasama antar | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <p>melaksanakan tugas rangkap untuk beberapa kegiatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung.</p> <p>3.Adanya kendala jaringan internet pelaporan SI - PTM berbasis Web.</p> | <p>pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk Pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular serta pembinaan Posbindu PTM</p> | |
| | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat | | | | | 12.573.395.000 | 12.351.997.606 | <p>- Masih terdapat masyarakat miskin Kabupaten Bintan yang tidak terdata di DTKS Kementerian Sosial RI.</p> <p>- Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten</p> | <p>- Koordinasi dengan Dinas terkait (Dinas Sosial) untuk mendata dan memasukkan masyarakat miskin di Kabupaten Bintan</p> | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <p>Bintan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapatnya peserta JKN mandiri yang menunggak pembayaran sehingga ketika sakit harus melunasi tunggakan tersebut. - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya manfaat JKN | <p>kedalam data DTKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan anggaran untuk bantuan biaya iuran jaminan kesehatan nasional dan mengusulkan tambahan kepesertaan JKN melalui dana cukai rokok provinsi kepulauan riau. - Melakukan sosialisasi tentang manfaat dari JKN | |
| | | | | Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat | | | | | 121.206.000 | 73.262.725 | pandemi Covid-19, PPKM level 4, sehingga sulit untuk melakukan | bekerja sama dengan forum yang ada di Kecamatan, | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | kegiatan langsung kelapangan / Masyarakat, dan anggaran yang beberapa kali mengalami Refocussing | dalam melaksanakan tatanan Kabupaten/ Kota sehat | |
| | | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | 91.200.000 | 91.200.000 | | | |
| | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 1.368.000.000 | 1.368.000.000 | | | |
| | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 867.301.140 | 825.018.920 | | | |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas | | | | | 1.045.240.000 | 415.038.840 | Tidak terlaksananya Survei Akreditasi | Meninformasikan kepada Dinas | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | Puskesmas sesuai roadmap yang dibuat, dikarenakan Pandemi Covid 19 sesuai surat edaran Kemenkes RI bahwa Survei Akreditasi Puskesmas akan dilaksanakan apabila tidak Pandemi | kesehatan Provinsi untuk di teruskan ke Kemenkes RI tentang jadwal Survei Akreditasi Puskesmas | |
| | | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | 82.061.450 | 67.467.080 | 1 Kondisi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan kinerja program surveilans dan imunisasi karena sebagian besar SDM terkonsentrasi pada | 1.Perlunya penambahan SDM Surveilans dan Imunisasi di masa pandemic Covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan program dapat terlaksana dengan baik dengan | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|--|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | penangan Covid-19 | SDM yang cukup | |
| | | | | | | | | | | | 2.Rendahny a kinerja Surveilans (penemuan kasus) AFP karena kondisi Covid-19 | 2.Meningka tkan bimbingan teknis kepada petugas surveilans dan imunisasi puskesmas | |
| | | | | Pelaksana an Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | 11.832.600 | 7.300.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kesehatan | Dinas Kesehatan | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas 2. Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan | Persen | 80 | 80 | | | | | |
| | | | | | | | 10 | 10 | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 | Puskesmas | | | | | | | |
| 1 | | | | Pembangunan Puskesmas | | | | | 6.743.059.380 | 6.488.346.013 | Pembangunan puskesmas mantang ini dimulai pada bulan Mei 2021, namun uang muka Tahap 1 kegiatan pembangunan ini baru bisa diambil pada bulan September 2021 sehingga ini sangat menghambat proses pembangunan tersebut Masih ada 2 Puskesmas yg belum mempunyai gedung baru sesuai standar kementerian | Proses pencairan dana DAK ini sebaiknya tidak menggunakan prosen pencairan campuran sehingga pengusulan dana tidak menunggu kegiatan DAK lainnya Pembangunan Puskesmas Berakit dan Puskesmas Sri Bintan akan diusulkan tahun berikutnya | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | kesehatan yaitu Puskesmas Berakit dan Puskesmas Sri Bintang | | |
| 2 | | | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 393.250.000 | 369.963.602 | | | |
| 3 | | | | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | 1.830.000.000 | 1.767.367.484 | | | |
| 4 | | | | Pengembangan Puskesmas | | | | | 308.045.000 | 303.229.449 | | | |
| 5 | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | 378.505.000 | 372.703.634 | | | |
| 6 | | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan | | | | | 18.200.000 | 15.447.520 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | Kesehatan | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 2.628.000.000 | 2.532.863.536 | | | |
| | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | 1.043.361.420 | 979.545.960 | - Masih rendahnya cakupan ASPAK di Puskesmas dikarenakan anggaran DAK dari pusat memang dibatasi dan dialihkan untuk penanganan covid sedangkan dari anggaran APBD tidak tersedia - Belum tersosialisasinya e-watch alkes | Melakukan Sosialisasi e-watch alkes terus menerus, sehingga laporan atas KTD (kejadian tidak diinginkan) dari alat kesehatan dapat ditindaklanjuti | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | Terintegrasi | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Pengelolaan Datad an Informasi Kesehatan | | | | | 17.180.000 | 15.856.015 | Kurangnya pemahaman dan pengetahuan SDM di Puskesmas | Mengadakan bimbingan dan pelatihan SDM untuk pengelolaan data system informasi kesehatan | |
| 2 | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | 840.680.000 | 825.272.125 | Jaringan internet yang belum memadai | Peningkatan jaringan di setiap wilayah kabupaten Bintan | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kesehatan | Dinas Kesehatan | | Program Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah | 1. Peningkatan Kelas/Type Rumah sakit | Tipe | C | C | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 5 | Kesehatan | Dinas Kesehatan | | Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 1. Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan | Puskesmas | 15 | 12 | | | | | |
| | | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | | 7.820.346.813 | 4.551.472.987 | | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | 24.957.947 | 24.817.835 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | n Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradision al (UMOT) | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradision al (UMOT) | | | | | 259.605.000 | 204.952.830 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 2 | | | | <p>Program Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</p> | | | | | | | | | |
| 3 | | | | <p>Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat</p> | | | | | 16.254.000 | 1.450.300 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | |
| | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | 316.228.735 | 250.801.760 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Program Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik</p> | | | | | 0 | 0 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 31.568.200 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup | | | | | 0 | 0 | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|---|---|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | Bersih dan Sehat | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase Desa yang melaksanakan PHBS | Persen | 70 | 67 | | | | | |
| | | | | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | 3.613.199.850 | 3.578.162.000 | Survey Rumah tangga yang melaksanakan PHBS juga mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19 | Meningkatkan penyuluhan tentang PHBS disetiap tatanan. Meningkatkan advokasi dengan perusahaan dan organisasi kemasyarakatan untuk dukungan | |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | program kesehatan | |

Keterangan:

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Bagian;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2020;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

10.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan |
|-----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu (JANTENKAYA) | Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Penggerak Posyandu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Bintan Tahun 2020 | Memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada kader Posyandu |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintan | Perbup No. 35 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintan Perbup No.7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Bintan | Meringankan beban masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak terdaftar pada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gratis baik di Puskesmas maupun di RSUD Bintan; Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bintan ke pelayanan kesehatan |
| 4 | Poli Malam di Puskesmas | SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan: Nomor | Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bekerja pada pagi |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 177/SK/2017 tentang Pembentukan Poli Malam | hingga sore hari dengan tetap memperoleh pelayanan kesehatan di malam hari ketika mereka membutuhkan termasuk bagi ibu hamil yang akan bersalin |
| 5 | Kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) PTM (Penyakit Tidak Menular) Mobile | Surat Edaran No.192 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kamis IVA (Inspeksi visual, dengan Asama Asetat) di Kabupaten Bintan | Memberikan pemeriksaan kesehatan PTM (Penyakit Tidak Menular) yang dibutuhkan masyarakat di luar gedung usia 15 tahun keatas |
| 6 | Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah | Perbup No. 58 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan | Memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di luar daerah; Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan. |
| | E-Puskesmas | MOU No. 16/440/I/2021 antara Dinas Kesehatan dengan PT. INFOKES Indonesia | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam Bentuk Inovasi berupa Pelayanan Digitalisasi Pelayanan Tingkat Puskesmas agar pelayanan dapat dilaksanakan lebih cepat serta meningkatkan efiden base data Kesehatan lebih baik. |
| | | | |

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**



- 2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;**
- 3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.**

2.5 Penghargaan

Tabel 2.4

Penghargaan yang Diraih Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021

| No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | PD/Bagian Penerima Penghargaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan | Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan) |
|----|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI | UPTD Puskesmas Tanjung Uban | Makasar, 23 Juli 2019 |  |
| 2 | Pelayanan Akta Kelahiran Anak yang Baru Lahir | Bupati Bintan | RSUD Kab. Bintan | Bandar Seri Bentan, 9 Desember 2019 |  |
| 3 | Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melali Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tingkat Provinsi Tahun 2019 | Plt. Gubernur Kepulauan Riau | Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan | Tanjungpinang, 24 September 2019 |  |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|---|
| 4 | Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI | RSUD Kabupaten Bintan | Batam, 7 November 2019 |  |
| 5 | Rumah Sakit Ramah Anak | Plt. Gubernur Kepulauan Riau | RSUD Kabupaten Bintan | Tanjungpinang, 1 Agustus 2019 |  |

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BINTAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KABUPATEN BINTAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
2020

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2020

| No | Rekomendasi DPRD | Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran) | Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan |
|-----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | a. MOU pelayanan Kesehatan gratis dengan RSUD Engku Haji Daud b. Syarat penerimaan Pelayanan Kesehatan Gratis c. Peningkatan Jenis Layanan Kesehatan Gratis | a. MOU tentang Pelayanan Kesehatan Gratis dengan RSUD Engku Haji Daud telah dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan Jaminan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.811.944.709 pada tahun 2021 b. syarat penerima pelayanan Kesehatan Gratis yaitu setiap masyarakat yang memiliki KTP Bintan dan yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Lainnya hal ini sudah diatur oleh “Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.” c. Jenis Layanan Kesehatan Gratis masih mencakup pelayanan Kesehatan dasar tingkat Puskesmas, Pelayanan rawat inap kelas 3 dan pelayanan gawat darurat pada RSUD Bintan dan RSUD Lainnya yang telah bekerja sama kegiatan ini dianggarkan pada program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | a. untuk pelayanan Kesehatan gratis telah di atur sesuai dengan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2020 untuk menghindari terjadinya double costing pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat b. peningkatan jenis pelayanan Kesehatan belum bisa ditingkatkan dan dikembangkan dikarenakan keterbatasan anggaran yang di dapat untuk pelaksanaan program tersebut. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan yaitu dengan total pagu sebesar Rp. 12.573.395.000 | |
| 2 | Menekan Angka Kasus Kematian pada Ibu Melahirkan | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu telah dilaksanakan pada Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan total pagu sebesar Rp. 46.165.164 dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan total pagu sebesar Rp. 709.703.000 | Kasus angka kematian ibu pada tahun 2021 masih terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 5 orang menjadi 7 orang hal ini dikarenakan pengaruh dari dampak pandemic Covid 19 yang terus berlangsung sepanjang 2021 dimana dari 7 kasus 5 diantaranya disebabkan oleh penularan covid 19. |

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kabupaten Bintan ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;**
- 3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Bagian tersebut;**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .**

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

Pada tahun 2021 ini Dinas Kesehatan Kabupaten tidak ada Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Bintan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Bintan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Bintan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan “KABUPATEN BINTAN YANG MADANI DAN SEJAHTERA MELALUI PENCAPAIAN BINTAN GEMILANG 2025”.